



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
**UNIT KERJA** : TVRI STASIUN SUMATERA BARAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BASUKI WIDODO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA**
3. NHK : **919020**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , Rp. 160.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/91 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/91 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **299.600.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, WARISAN Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOTOR, HONDA ASTREA STAR Tahun 1986, WARISAN Rp. 1.300.000
5. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000



6. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, LAINNYA Rp. 3.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.650.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	63.354.774
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.514.604.774
III. HUTANG	Rp.	5.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.514.599.774

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.